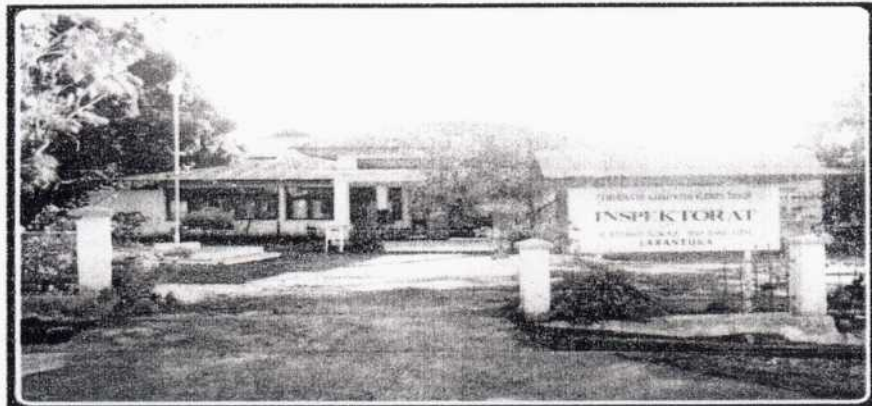




**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Kerja (RENJA) Akhir Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : " Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (14)".

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Flores Timur 2020 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Pada perjalanannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja (Renja). Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Flores Timur disusun untuk menyempurnakan perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RKPD 2020.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Flores Timur tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran dan tolak ukur pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Flores Timur serta mensinergikan kegiatan di setiap bidang untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Flores Timur.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebijakan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Larantuka, 21 Oktober 2020

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19651023 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. MAKSUD

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah:

1. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam periode Tahun 2020
2. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2020;
3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3. TUJUAN

1. Sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2020;
2. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2020;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2020.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya kebutuhan untuk merubah indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja
- 1.5 Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Menguraikan tentang evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat sampai Semester I Tahun 2020 dan faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja serta tindak lanjut yang diperlukan pada semester II.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Berisikan Rencana Kerja dan pendanaan inspektorat pada perubahan anggaran tahun 2020

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan triwulan II Tahun 2020, predikat kinerja program seluruh program masuk kategori rendah (36,97%). Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD berikut :

Tabel 2.1

No.	Kode	Uraian Uraian Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2020 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan :				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2020 (%)		Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	8		9		10		13=9+10+11+12		14=13/8*100		18
		Inspektorat													
		PROGRAM SKPD													
1	2 0					4,400,545,296.00	584,328,878.00	575,093,350.00				1,159,422,228.00		26.35%	
1	2 0 7 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggara nyanya pelayanan n administrasi perkantoran	46,569	609,586,060.00	10,396	164,750,300.00	9,152	112,680,436.00	19,548	277,430,736.00	41.98	45.51%	
1	2 0 7 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat		Terpenuhi nya tertib administrasi surat menyurat dinas	100	3,954,000.00	15	363,900.00	27	812,700.00	42	1,196,600.00	42.00%	30.26%	
2	2 0 7 1 2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhi nya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	29,500,000.00	3	6,415,500.00	3	7,202,917.00	6	13,618,417.00	50.00%	46.16%	

[illegible]

8	1	2	0	0	1	2	0	7	1	2	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedian ya komponen instalasi listrik	5	komponen	7.335.960.00	3	970.000.00	600.000.00	1	489.531.00	1	1.089.531.00	20.00%	14.85%
9	1	2	0	0	1	2	0	0	1	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedian ya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	jenis	5.384.000.00	3	970.000.00	1.253.000.00	3	2.223.000.00	100%	41.29%		
10	1	2	0	0	1	2	0	0	1	8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Terkordin asinya kegiatan di Inspektora t Daerah	57	kali	149.875.000.00	16	56.408.900.00	56.408.900.00	16	56.408.900.00	28.07%	37.64%		
11	1	2	0	0	2	2	0	0	1	0	Peyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedian ya tenaga pendukung teknis perkantoran	20	orang	276.000.000.00	20	65.550.000.00	65.550.000.00	20	131.100.000.00	100%	47.50%		
II	1	2	0	0	0	2	0	0	7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatk an kualitas pelayanan publik	24.00		57.025.736.00	4.00	6.147.630.00	52.409.064.00	10	58.556.694.00	41.67	102.58%		

[illegible]

112076	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan capaian kinerja program dan keuangan SKPD	9,00	28.812.500,00	2	4.154.500,00	2,00	4.764.000,00	4	8.918.500,00	44,44	30,95%
			Tersedianya laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,00	28.812.500,00	2	4.154.500,00	2	4.764.000,00	4	8.918.500,00	44,44%	30,95%
1120761	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			9,00	28.812.500,00	2	4.154.500,00	2	4.764.000,00	4	8.918.500,00	44,44%	30,95%
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				3.477.291.000,00		380.176.448,00		377.489.850,00	-	757.666.298,00		21,79%

V	1	2	0	2	2	0	7	0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan sistem dan prosedur tata kelola pemerintahan daerah	Prosentase tingkat penanganan dan penyalahgunaan wewenang terhadap total APBD.	1,045.00	2,969,865,000.00	91.00	318,443,423.00	120.00	374,514,850.00	211	692,958,273.00	20.17	23.33%
1	1	2	0	2	0	2	0	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal berkala		Meningkatnya penanganan internal secara berkala	452	1,453,077,000.00	54	170,845,000.00	85	268,301,000.00	139	439,146,000.00	30.75%	30.22%
2	1	2	0	2	0	2	0	2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya persentase penanganan kasus di lingkungan pemerintahan daerah	30	253,250,000.00	13	80,780,450.00	4	34,934,350.00	17	115,714,800.00	56.67%	45.69%
8	1	2	0	2	4	2	0	3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)		Meningkatnya pengetahuan satu tugas SPIP di lingkungan pemerintahan	333	100,649,000.00	83	31,432,700.00	70	20,475,000.00	153	51,907,700.00	45.95%	51.57%
3	1	2	0	2	0	2	0	6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Tersedianya hasil temuan pengawasan	45	610,056,000.00	11	32,615,350.00	6	14,568,000.00	17	47,183,350.00	37.78%	7.73%

5	1	2	0	2	3	MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi		Meningkatnya kepatuhan/kelaksanaan aparatur pemerintah terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang berakur	9 kali	217.694.000.00	2	15.024.982.00	2	14.614.000.00	4	29.638.982.00	44.44%	13.61%
4	1	2	0	2	0	Koordinasi Pengawasan		Terkordinasinya program kerja pengawas an tahunan pada tingkat APIP dan APEP	5 kali	117.780.000.00							0.00%	0.00%
6	1	2	0	2	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan		Tersusunnya data hasil temuan pengawas an	77 LH P	54.135.000.00				475.000.00		475.000.00	0.00%	0.88%
7	1	2	0	2	4	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUN GLI)		Terlaksananya pemberantasan praktek Pungutan Liar	95 kali	163.224.000.00	11	19.177.641.00	23	41.622.500.00	34	60.800.141.00	35.79%	37.25%

[illegible]

Tabel 2.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Semester I
Serta Tindak Lanjut Yang Diperlukan
Inspektorat Pada Semester II Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	Tindak Lanjut Yang Diperlukan Pada Semester II
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Anggaran yang cukup, SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Anggaran yang cukup, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan Anggaran yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan Anggaran yang cukup, SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan Anggaran yang cukup, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD

		melaksanakan tugas			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Anggaran yang cukup, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD	
7	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Anggaran yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Anggaran yang cukup, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan Anggaran yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD	
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Ketersediaan Anggaran yang cukup, SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana		Agar disesuaikan dalam Renja PD	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
12	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Kurangnya anggaran sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor	Agar diuluskan dalam Renja PD	

13	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
14	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kurangnya anggaran sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan toilet dan penataan taman	Agar disesuaikan dalam Renja PD
15	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Ketersediaan Anggaran yang cukup, SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan optimal	Agar disesuaikan dalam Renja PD
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar diusulkan dalam Renja PD
18	Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
19	Penyusunan Laporan	SDM yang kompeten, Tersedianya	Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi	Agar disesuaikan dalam Renja PD

	Capaian Kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	anggaran untuk penanganan Covid-19	
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
20	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19, Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
21	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19, Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
22	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19, Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
23	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19, Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
24	MONEV terhadap aksi Penanggulangan korupsi dan pembinaan wilayah bebas korupsi	SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19, Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
25	Koordinasi Pengawasan		Kegiatan dihentikan akibat masa pandemic Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar diuruskan dalam Renja PD

26	Inventarisasi Pengawasan	Temuan		Kegiatan dihentikan akibat masa pandemik Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar diusulkan dalam Renja PD
27	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli)		SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemik Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
VI	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
28	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat Masa Pandemik Covid	Agar disesuaikan dalam Renja PD
29	Pelatihan Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Teknis		SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kegiatan dihentikan akibat masa pandemik Covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD
VII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				
30	Penyusunan Sistem dan prosedur pengawasan		SDM yang kompeten, Tersedianya sarana dan prasarana, Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas	Kurangnya anggaran akibat rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19	Agar disesuaikan dalam Renja PD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Kegiatan Inspektorat yang mengalami perubahan sebanyak 29 kegiatan yang meliputi pergeseran anggaran antar rekening, pengurangan output, penambahan output, dan perubahan lainnya yang berimplikasi pada penambahan maupun pengurangan anggarannya.

Rencana Perubahan anggaran program dan kegiatan dituangkan dalam matrik sebagaimana berikut :

Tabel 3.1.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RANCANGAN AWAL		HASIL ANALISA KEBUTUHAN		KET.
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	609,586,060.00	100%	557,149,760.00	
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	100 kali	3,954,000.00	100 kali	2,965,000.00	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	29,500,000.00	12 bulan	34,600,000.00	
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dilayani perizinannya	13 unit	5,350,000.00	13 unit	2,355,500.00	
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan penyedia jasa administrasi keuangan	12 bulan	33,000,000.00	12 bulan	33,000,000.00	

4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan	12 bulan	7,907,000.00	12 bulan	6,842,500.00	
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	54 jenis	54,787,600.00	54 jenis	65,676,600.00	
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	46.281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar penggan daan + 600 eksempl ar penjiilidan)				
				36,492,500.00		41,555,300.00	
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 komponen	7,335,960.00	5 komponen	7,335,960.00	
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	5,384,000.00	3 jenis	4,909,000.00	
	Rapat-rapat	Jumlah rapat		149,875,000.00		95,709,900.00	

4.02.4.02.01.01.18	Koordinasi dan Konsultasi	koordinasi dan konsultasi	57 OK		57 OK		
4.02.4.02.01.01.20	Penyediaan tenaga dan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	21 orang	276,000,000.00	21 orang	262,200,000.00	
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		57,025,736.00		111,079,823.00	
4.02.4.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		0.00	4 buah	14,950,000.00	
4.02.4.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/berkala dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara	1 unit	9,155,000.00	1 unit	9,155,000.00	
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	9,684,750.00	1 unit	51,052,750.00	
4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	1 unit	23,885,986.00	1 unit	25,622,073.00	
4.02.4.02.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	21 unit	14,300,000.00	21 unit	10,300,000.00	

4.02.4.02.01.05.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP		227,830,000.00			121,255,700.00		
4.02.4.02.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	68,200,000.00			0.00		
4.02.4.02.01.05.10	Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas	Jumlah bimbingan teknis peningkatan kapabilitas yang diselenggarakan	1 kali	159,630,000.00		1 kali	121,255,700.00		
4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		28,812,500.00			29,162,750.00		
4.02.4.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	9 dokumen	28,812,500.00		9 dokumen	29,162,750.00		

4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal		2,969,865,000.00		1,851,315,291.00	
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah objek pengawasan	452 obyek pengawasan	1,453,077,000.00	452 obyek pengawasan	1,132,266,200.00	
4.02.4.02.01.20.02	Penanganan Kasus di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	30 kasus	253,250,000.00	30 kasus	218,129,000.00	
4.02.4.02.01.20.03	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah satuan tugas yang mengikuti sosialisasi SPIP, bimtek SPIP dan rapat evaluasi	333 orang	100,649,000.00	333 orang	88,788,700.00	
4.02.4.02.01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan	45 obrik	610,056,000.00	45 obrik	223,151,000.00	
4.02.4.02.01.20.39	MONEV terhadap aksi Penanggulangan korupsi dan pembinaan wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	9 kali	217,694,000.00	9 kali	70,651,000.00	

	bebas korupsi								
4.02.4.02.01.20.40	Koordinasi Pengawasan	Jumlah rapat koordinasi pengawasan	5 kali	117,780,000.00	5 kali	130,000.00			
4.02.4.02.01.20.41	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP)	77 LHP	54,135,000.00	77 LHP	6,733,000.00			
4.02.4.02.01.20.42	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli)	Jumlah sapu bersih pungutan liar yang dilaksanakan	95 kali	163,224,000.00	95 kali	111,466,391.00			
4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP		477,500,000.00		67,108,025.00			
4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	6 orang	199,805,000.00	6 orang	31,576,000.00			
4.02.4.02.01.21.02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	11	277,695,000.00	11	35,532,025.00			

		dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang		orang	
4.02.4.02.01.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah APiP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		29,926,000.00		24,926,000.00
4.02.4.02.01.22.01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan	3 dokumen	29,926,000.00	3 dokumen	24,926,000.00

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan perubahan terhadap 29 kegiatan, yang meliputi perubahan output kegiatan, target output kegiatan, dan pagu dana kegiatan. Anggaran yang diusulkan pada perubahan Renja tahun 2020 adalah sebesar **Rp.2.761.997.349,00**

Perubahan kegiatan dilakukan agar lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dan pencapaian target secara maksimal.

Larantuka, 21 Oktober 2020

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, 



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19651023 199503 1 002